

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan dasar untuk memahami lebih mendalam mengenai *corporate governance*. Teori ini dianggap penting karena berkaitan erat dengan *corporate governance*, sehingga sering digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Taman dan Nugroho (2011) hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih pemilik perusahaan (*principal*) mempekerjakan manajer perusahaan (*agent*) yang bertujuan untuk memberikan suatu jasa dan selanjutnya memberikan kekuasaan kepada *agent* tersebut untuk membuat suatu keputusan atas nama *principal* tersebut.

Konflik kepentingan ini yang terjadi antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer perusahaan (*agent*) yang disebabkan karena *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga hal ini akan memicu adanya biaya keagenan (*agency cost*). Dengan diberikannya wewenang kepada pihak manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan, diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk mensejahterakan pemilik perusahaan (*principal*) baik dalam rentang

waktu jangka pendek maupun jangka panjang (Jensen dan Meckling (1976) dalam Taman dan Nugroho (2011)).

Manajer perusahaan yang merupakan pengelola dari suatu perusahaan akan lebih mengetahui tentang informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik perusahaan (*principal*). Dalam suatu perusahaan manajer memiliki kewajiban untuk memberikan sinyal yang baik mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik perusahaan. Salah satu pemberian sinyal dari manajer perusahaan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan sangat penting bagi para pengguna informasi eksternal, terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi ketidakpastian yang paling besar (Isnanta (2008) dalam Taman dan Nugroho (2011)).

Dengan demikian, manajemen sangat diperlukan untuk melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan. Selain itu untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang muncul antara *principal* dan agen dapat dilakukan dengan sistem pengawasan yang selanjutnya dikenal dengan *corporate governance* yang berfungsi untuk menurunkan atau menekan biaya keagenan (*agency cost*).

## 2. *Corporate Governance*

*Corporate governance* pada dasarnya merupakan hubungan partisipan dalam melakukan penentuan mengenai arah dan kinerja perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) *corporate governance* merupakan salah satu dasar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berhubungan erat dengan kepercayaan, baik pada perusahaan yang telah melaksanakan maupun pada kondisi usaha suatu negara. Dengan diterapkannya *corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat menciptakan adanya persaingan yang sehat dan kondisi usaha yang kondusif (KNKG (2006) dalam Wardani (2008)).

Menurut *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) *corporate governance* adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang dibutuhkan oleh setiap bagian-bagian dalam perusahaan yang bertujuan untuk memberi nilai tambah bagi perusahaan secara berkelanjutan dalam waktu jangka panjang. Hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku (IICG (2009: 3) dalam Taman dan Nugroho (2011)).

*Corporate governance* juga merupakan seperangkat aturan yang dijalankan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk menegaskan bahwa tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk mensejahterakan para pemangku kepentingan dan memenuhi kepentingan lainnya, bukan hanya untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri (Rompas, dkk.,

2014). Dengan demikian, penerapan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia sangatlah penting untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. *Corporate governance* memberikan suatu kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan akan berjalan secara efektif, sehingga mekanisme *checks and balance* dalam perusahaan dapat terwujud.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis**

### 1. Kesempatan Investasi dan Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Perusahaan dengan kesempatan investasi yang tinggi akan membutuhkan dana yang besar, dan apabila kebutuhan akan sumber pendanaan internal tidak lagi mencukupi maka perusahaan akan menggunakan sumber pendanaan dari pihak eksternal untuk melakukan ekspansi. Berkaitan dengan hal tersebut maka perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas implementasi *corporate governance* yang bertujuan untuk mempermudah dalam memperoleh pendanaan dari pihak eksternal dan menurunkan biaya modal (Klapper dan Love (2002), dan Durnev dan Kim (2003)). Pada saat kesempatan investasi semakin menguntungkan, maka *return* atas investasi dari pemegang saham juga akan semakin besar daripada manfaat yang diterima, apabila melakukan diskresi terhadap sumber daya perusahaan (Durnev dan Kim, 2003).

Manajer pada suatu perusahaan yang mempunyai kesempatan investasi tinggi dalam hal pemilihan proyek, maka manajer tersebut akan

berkesempatan untuk melakukan diskresi yang semakin besar, daripada manajer perusahaan yang memiliki kesempatan investasi rendah (Gillan *et al.* 2003). Dengan demikian, perusahaan dengan kesempatan investasi tinggi cenderung akan membutuhkan kualitas *corporate governance* yang semakin baik dan berkualitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulyanti (2011) menyatakan bahwa kesempatan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Berbeda dengan penelitian Taman dan Nugroho (2011) dan Rahayuningsih (2013) yang menyatakan bahwa kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Kesempatan investasi berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

## 2. Penjualan dan Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Penjualan berhubungan erat dengan kualitas implementasi *corporate governance*, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penjualan dalam penelitian ini merupakan perbandingan antara penjualan bersih atau pendapatan usaha dengan *asset* tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Penjualan mempunyai pengaruh yang strategis bagi suatu perusahaan, karena penjualan yang dilakukan juga harus didukung dengan harta ataupun *asset* yang dimiliki. Apabila penjualan dalam suatu

perusahaan ditingkatkan maka secara otomatis *asset* pun juga harus ditambah untuk menunjang kebutuhan perusahaan (Weston dan Brigham, 2001). Perusahaan akan memanfaatkan *asset* tetap yang telah ditanamkan untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan. Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan harus menerapkan kualitas *corporate governance* yang baik, dengan tujuan dapat memaksimalkan perusahaan dalam memperoleh laba.

Perusahaan menanamkan modalnya pada *asset* tetap berwujud karena mudah di monitor dan sulit diselewengkan dibandingkan dengan *asset* lancar dan *asset* tidak berwujud yang mudah untuk diselewengkan (Klapper dan Love, 2002). Hasil penelitian yang dilakukan Meitha dan Tuzahro (2009) menunjukkan bahwa penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2013) menunjukkan bahwa penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Penjualan berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

### 3. Ukuran Perusahaan dan Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Ukuran perusahaan terbukti memiliki peranan penting dalam menentukan modal yang akan digunakan oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang

dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai saham, total *asset*, dan lain sebagainya. Terdapat dua sudut pandang mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerapan *corporate governance* (Klapper dan Love, 2002). Sudut pandang pertama menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan cenderung memiliki lebih banyak masalah keagenan, sehingga perusahaan tersebut membutuhkan mekanisme *corporate governance* yang ketat. Sementara sudut pandang kedua menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran kecil memungkinkan adanya kesempatan tumbuh yang lebih baik, sehingga kebutuhan akan dana eksternal juga semakin besar untuk meningkatkan kebutuhan atas mekanisme *corporate governance* yang semakin baik.

Perusahaan yang besar akan menjadi sorotan dan perhatian publik, dengan hal tersebut perusahaan akan terdorong untuk menerapkan struktur dan meningkatkan kualitas *corporate governance* (Durnev dan Kim, 2003). Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil, karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas yang lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Hardanti dan Gunawan, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) dan Sulyanti (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahayuningsih (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

#### 4. *Leverage* dan Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

*Leverage* merupakan pembiayaan modal pada suatu perusahaan dengan proporsi hutang yang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri. Menurut Jensen (1986) kepemilikan hutang perusahaan adalah salah satu mekanisme untuk mempersatukan kepentingan manajer dengan para pemegang saham. Hutang tersebut akan memberikan sinyal yang berkaitan dengan bagaimana kondisi keuangan pada suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Perusahaan yang memiliki proporsi hutang yang tinggi, akan cenderung diawasi oleh kreditor. Kemungkinan besar perusahaan akan melakukan pelanggaran dengan semakin tingginya nilai *Debt Equity to Ratio*. Pelanggaran tersebut terkait dengan perjanjian kontak hutang, dimana perusahaan akan berusaha untuk melakukan manipulasi laporan keuangan agar terlihat semakin baik tanpa memperhatikan kualitas *corporate governance* (Durnev dan Kim, 2003).

Pendapat lain mengenai hubungan antara *leverage* dengan kualitas implementasi *corporate governance* pada suatu perusahaan

dijelaskan dengan dua sudut pandang dalam perspektif yang berbeda (Black *et al.* 2006). Sudut pandang pertama (*a substitution story*) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat hutang tinggi dalam struktur permodalan, maka akan cenderung diawasi oleh kreditor dengan lebih ketat yang biasanya dinyatakan pada saat pembuatan kontrak perjanjian hutang. Sudut pandang kedua (*an investor pressure story*) menyatakan bahwa kreditor memiliki kepentingan dan kekuasaan yang sangat besar dengan praktik *corporate governance* dari debiturnya, bila dibandingkan dengan para pemegang saham yang hanya memaksa perusahaan untuk meningkatkan kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan, apabila perusahaan mendanai bisnisnya dengan proporsi hutang yang tinggi dalam struktur modalnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Black *et al.* (2006) dan Yastuti (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Taman dan Nugroho (2011), Isditanadevi dan Puspaningsih (2014) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub>: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

## 5. Profitabilitas dan Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Profitabilitas merupakan kemampuan dari perusahaan dalam memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang (Wijaya dan Hadianto (2008) dalam Hardanti dan Gunawan (2010)). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih luas dalam pengungkapan informasi, yang berguna untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan terkait dengan kualitas implementasi *corporate governance* (Muhamad, dkk., 2009). Sehingga dengan profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kualitas *corporate governance* yang lebih baik.

Hasil penelitian yang dilakukan Hikmah, dkk., (2011) dan Putranto dan Raharja (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Isditanadevi dan Puspaningsih (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>5</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

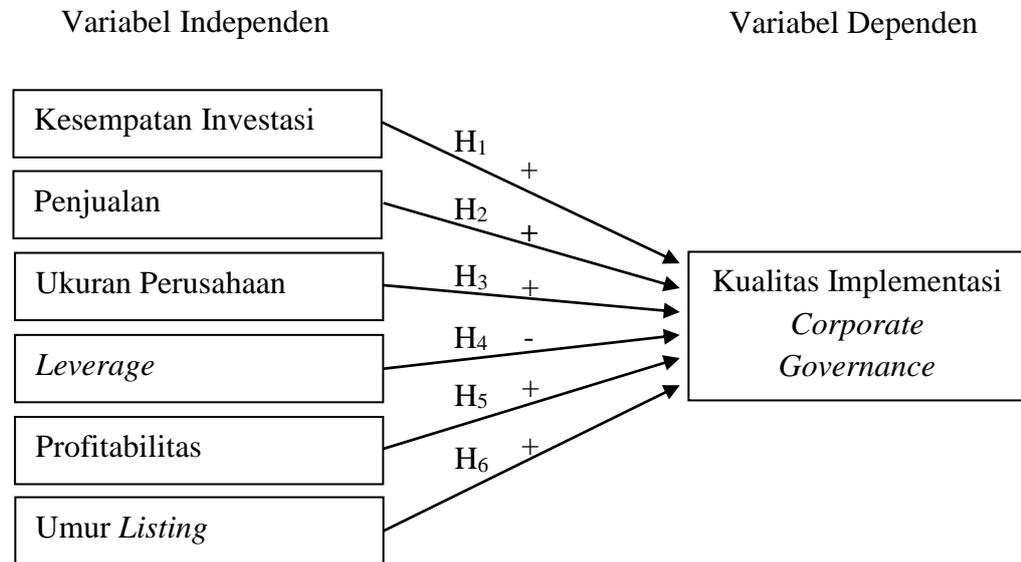
## 6. Umur *Listing* dan Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Umur *listing* merupakan umur dari suatu perusahaan pada saat saham perdananya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Umur *listing* perusahaan berkaitan dengan kelangsungan usaha dari suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut mampu untuk bersaing dan bertahan dalam dunia bisnis atau tidak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, dkk., (2011) menunjukkan bahwa umur *listing* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Isditanadevi dan Puspaningsih (2014) yang menyatakan bahwa umur *listing* tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*.

Perusahaan yang telah lama *listing* di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan bisnis (Isditanadevi dan Puspaningsih, 2014). Dengan demikian, perusahaan tersebut mendapatkan penilaian positif dari *stakeholder* karena pengalamannya dalam mengelola perusahaan dari tahun ke tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut semakin memiliki kualitas *corporate governance* yang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>6</sub>: Umur *listing* berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

### C. Model Penelitian



**GAMBAR 2. 1.**  
**MODEL PENELITIAN**